

OPEN ACCESS

Citation: Kusumawardhani, RT; Octavia, E. (2023). Implikasi Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Inflasi. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 8(2), 236-254

Received: September 5, 2023
Revised: October 24, 2023
Accepted: October 31, 2023
Published: November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

IMPLIKASI HARGA GABAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI TANAMAN PANGAN DAN INFLASI

Grain Price Implications for Food Crop Farmers' Welfare and Inflation

Rosalina Tineke Kusumawardhani¹⁾ dan Emillia Octavia²⁾

^{1,2)} Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta
email: rosalina.tineke@gmail.com; emillia.octavia@gmail.com

Abstract

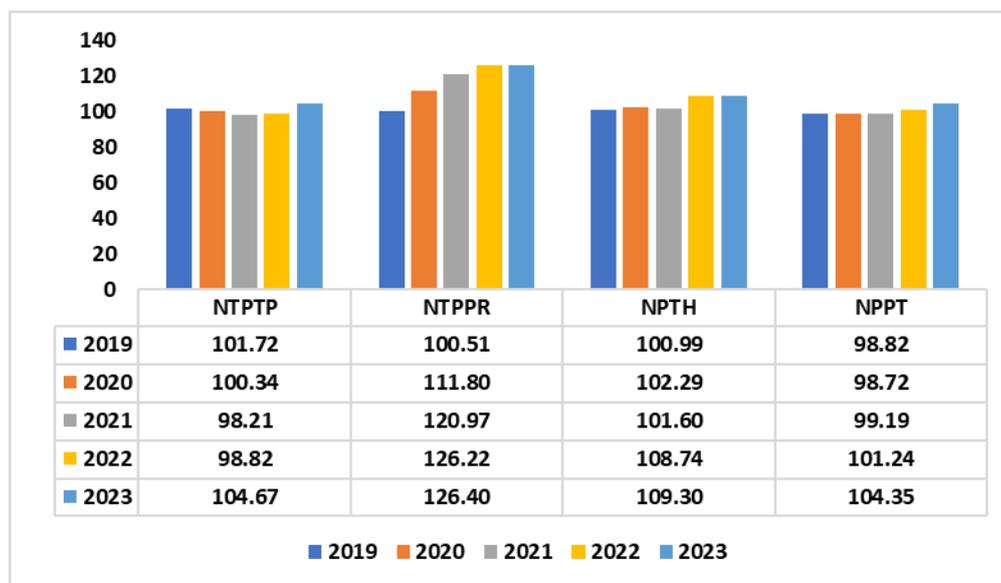
The low level of welfare of food crop farmers has the potential to threaten the availability of human resources, due to the threat of commodity conversion. As a result, there is a potential for inflation due to food scarcity. Therefore, the paper aims to analyze the implications of grain prices on the welfare of food crop farmers and inflation. This research uses quantitative methods with regression models. The results show that first, harvested dry grain has positive and significant implications for farmers' welfare. While milled dry grain is not significant. Second, harvested dry grain has positive and significant implications for rice prices, but the price of milled dry grain is not significant for rice prices. Third, rice prices are able to influence the inflation rate. Therefore, the government needs to make efforts, namely first, good management of rice storage and distribution needs to be carried out by the government so that it can maintain the stock and stability of rice prices. Second, the government should regulate the distribution of planting so that the amount of harvest can be spread more evenly. Third, the government should increase the role of farmers as rice producers.

Keywords: food, farmers welfare, inflation, prices, grain.

JEL Classifications: D12; E31; I38; Q02; Q12; Q13; Q18; Q19.

I. PENDAHULUAN

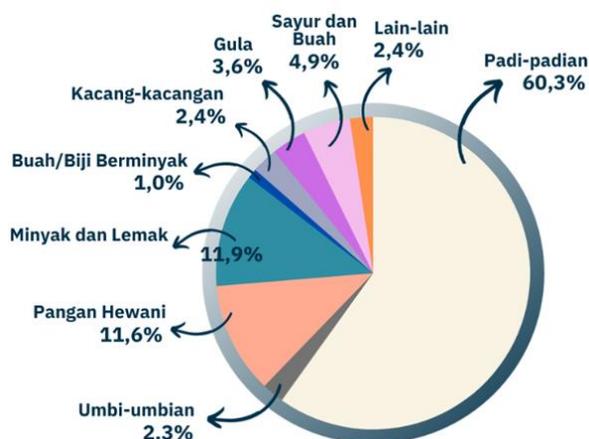
Kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan program prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. NTP pada tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar 105. NTP terbagi menjadi 4 sub sektor yaitu NTP Tanaman Pangan (NTPTP), NTP Hortikultura (NTPH), NTP Perkebunan (NTPPR), dan NTP Peternakan (NTPPT). Namun, NTPTP sebagai penghasil bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia yaitu komoditas beras masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan NTPPR dan NTPH (Gambar 1).



Gambar 1. Perbandingan NTP

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023a.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan ini berpotensi mengancam ketersediaan sumber daya manusia, karena adanya ancaman alih fungsi komoditas. Padahal saat ini masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas beras sebesar 60,3 persen (Gambar 2). Sedangkan konsumsi bahan pangan lainnya hanya di bawah 12 persen. Rendahnya NTP tanaman pangan di tengah meningkatnya harga gabah menunjukkan bahwa kenaikan harga gabah belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti meningkatnya potensi biaya input produksi.



Gambar 2. Perbandingan Konsumsi Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2021

Apabila kondisi kesejahteraan tanaman pangan ini tidak menjadi perhatian pemerintah, maka bukan suatu mustahil petaninya akan berpotensi alih komoditi. Seperti di Bengkulu, banyak petani yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan pangan ke perkebunan khususnya kelapa sawit. Menurut Astuti et al. (2011), alih fungsi lahan oleh petani dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertimbangan ekonomis (58,4 persen), lingkungan (22,2 persen), dan teknis (19,4 persen). Artinya secara rasional petani dapat berhitung komoditas mana yang lebih menguntungkan. Kondisi ini tentunya akan berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya tanaman pangan. Apabila sumber daya tanaman pangan terus mengalami penurunan, maka ketersediaan bahan pangan akan terancam sehingga berpotensi menimbulkan inflasi akibat kelangkaan pangan. Kondisi tersebut dapat mengganggu perekonomian nasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud menganalisis implikasi harga gabah terhadap kesejahteraan petani tanaman pangan dan inflasi. Sebelumnya terdapat penelitian mengenai dampak harga gabah terhadap nilai tukar petani tanaman pangan (Faillah, 2022) dengan variabel yang digunakan yaitu kesejahteraan petani dan harga gabah di tingkat petani 2018-2020 di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga gabah di tingkat petani berdampak positif dan signifikan terhadap NTP tanaman pangan. Sejalan dengan Faillah, Lestari (2021) menemukan bahwa harga jual gabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani. Pada penelitian Azwina dan Syahbudi (2023) mengenai pengaruh fluktuasi harga komoditas pangan terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Utara ditemukan bahwa harga beras berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian mengenai pengaruh harga beras terhadap juga dilakukan oleh Siregar (2020). Sedangkan *novelty* penelitian ini adalah penggunaan variabel inflasi, kesejahteraan petani tanaman pangan, dan harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) secara nasional. Karena itu, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis implikasi harga GKP dan harga GKG terhadap kesejahteraan petani tanaman pangan.
2. Menganalisis implikasi harga GKP dan harga GKG terhadap harga beras.
3. Menganalisis implikasi harga beras terhadap inflasi

Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, selain menganalisis implikasi harga GKP dan GKG terhadap kesejahteraan petani tanaman pangan, penelitian ini berkontribusi pada analisis implikasi harga GKP dan GKG terhadap inflasi yang belum terdokumentasi dengan baik pada penelitian-penelitian terdahulu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesejahteraan Petani

Sumarno dan Karsono (1995) dalam Andrianto (2014) menjelaskan pada dasarnya menurut tujuannya usaha tani dapat digolongkan menjadi 5 tingkatan yaitu subsistem penuh, tingkat subsistem fakultatif, tingkat prakomersial, tingkat semikomersial, dan tingkat komersial penuh. Gambaran nyata untuk masing-masing tingkatan usaha tani dikemukakan sebagai berikut:

a. Usaha tani tingkat subsistem penuh

Usaha tani pada tingkat subsistem penuh ditandai dengan aktivitas petani mengumpulkan/menanam dan memanen hanya tanaman yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam usaha tani tingkat subsistem penuh ini, kepemilikan barang dan sumber daya (tanah, ternak, air) bukanlah modal pasar

melainkan properti status sosial. Dalam hal ini dapat dikatakan kebutuhan akan teknologi tersebut tidak ada karena tidak adanya keinginan untuk melangkah lebih jauh.

b. Usaha tani tingkatan subsistem fakultatif

Usaha tani tingkatan subsistem fakultatif telah terjadi kegiatan ekonomi skala kecil. Hal ini ditandai oleh hasil panen yang terbatas pada skala bahan pangan yang dibutuhkan, tidak ada upaya optimalisasi produksi, cara bertani yang sederhana, tidak ada usaha tani yang intensif tanpa input atau input minimal, jika hasilnya lebih tinggi dari yang diperlukan maka akan dijual, guna menjamin pasokan pangan bagi keluarga. Komponen agroteknologi opsional dalam subsistem ini diperlukan untuk mencapai manfaat yang sangat optimal dalam sistem tumpang sari dengan jarak tanam dan kepadatan yang sesuai. Jenis teknologi yang digunakan adalah teknologi *low input*.

c. Usaha tani tingkat prakomersial

Usaha tani tingkat ini pada dasarnya berorientasi pada pasar, namun lebih berat lagi dalam hal produk yang biasanya mereka tanam dan konsumsi. Selain menanam tanaman pangan, tingkat pertanian ini juga mengolah tanaman yang dapat dipasarkan. Pendapatan tunai dari pertanian hanya menambah pendapatan dari peternakan atau pekerjaan di luar pertanian. Pada tingkat ini keuntungan dan kerugian kegiatan pertanian belum diperhitungkan. Teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pertanian pada tingkat ini adalah teknologi yang dapat mengoptimalkan produksi dengan memperbaiki pola tumpang sari pada tanaman eksotik. Selain itu, pertanian pada tingkat ini memerlukan teknologi untuk meningkatkan perawatan tanaman, termasuk pengolahan tanah, penyiangan, irigasi, dan pembuatan bedengan. Intensifikasi teknologi juga diperlukan untuk mendukung pengembangan pertanian prakomersial, selain mendorong upaya pemulihan dan konservasi kesuburan tanah.

d. Usaha tani tingkat semikomersial

Pertanian pada tingkat semikomersial dilakukan dengan menggunakan input yang optimal untuk mengoptimalkan produksi dengan mengombinasikan pencukupan pangan dan pendapatan tunai hasil penjualan hasil panen. Penggunaan lahan yang intensif untuk produksi, yaitu harus ada keseimbangan antara kecukupan pangan dan pendapatan tunai, harus memperhitungkan faktor untung dan rugi. Teknologi yang dibutuhkan dalam usaha tani pada tingkat ini adalah teknologi yang dapat meningkatkan hasil dan kualitas serta efisiensi input. Teknologi perbenihan merupakan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul yang mudah beradaptasi, tahan terhadap hama dan penyakit, serta tanggap terhadap masukan. Ada juga sistem pertanian yang efisien dari segi produktivitas dan ekonomi. Ada standarisasi, peningkatan kualitas melalui upaya pra dan pasca panen serta teknik pemasaran yang efektif.

e. Usaha tani tingkat komersial penuh

Usaha tani tingkat komersial penuh dicirikan oleh orientasi permintaan pasar, penggunaan teknologi baru dan metode pertanian intensif, inovasi dan penerapan dengan input yang optimal. Kualitas produksi diutamakan dengan pemasaran produk yang agresif dan tidak bergantung pada perantara atau pengepul. Teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan pertanian komersial sepenuhnya adalah yang paling menguntungkan, meskipun modal yang lebih berisiko mungkin diperlukan. Produk yang ditanam dapat bervariasi tergantung pada prospek pasar dari perspektif agrobisnis/agroindustri.

Masing-masing jenis tingkatan usaha tani tersebut memberikan tingkat kesejahteraan petani yang berbeda. Menurut Badan Pusat Statistik (2022a), salah satu pendekatan untuk mengukur indikator kemampuan daya beli petani di daerah perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam penelitian Ilman dan Syahbudi (2023) yang menganalisis pengaruh harga gabah terhadap kesejahteraan petani, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh (2013) bahwa untuk melihat dinamika tingkat kesejahteraan petani, salah satu alat bantu ukur adalah NTP di mana NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli petani dalam membiayai hidup rumah tangganya. NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (I_b). I_t merupakan indikator tingkat pendapatan produsen petani, sedangkan I_b dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun biaya produksi.

BPS (2022a) menjelaskan secara umum terdapat tiga macam pengertian NTP, yaitu:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang diterima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
- b. $NTP = 100$, berarti petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan rata-rata harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan rata-rata harga yang dibayar petani terhadap tahun dasar.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang dibayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang diterima terhadap tahun dasar atau ketika tingkat rata-rata.

2. Inflasi

Menurut Suseno dan Siti (2009), inflasi adalah peningkatan jumlah uang beredar atau peningkatan likuiditas dalam perekonomian. Definisi ini mengacu pada gejala umum yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar dan dapat menyebabkan peningkatan harga. Dalam perkembangannya, inflasi dipahami sebagai tren kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berkelanjutan. Suseno dan Siti (2009) juga menyatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu.

Dilihat dari faktor utama penyebabnya, inflasi disebabkan dari sisi penawaran, permintaan dan ekspektasi.

- a. Inflasi dari sisi permintaan
Inflasi permintaan (*demand pull inflation*) adalah inflasi yang timbul apabila permintaan barang dan jasa meningkat relatif terhadap ketersediaannya. Dengan demikian, permintaan agregat lebih besar dari pada kapasitas perekonomian sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga.
- b. Inflasi dari sisi penawaran
Inflasi penawaran (*cost push inflation*) disebabkan dari sisi penawaran atau kenaikan biaya produksi. Jenis inflasi ini antara lain inflasi yang disebabkan faktor penawaran lain yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti adanya kenaikan bahan bakar minyak, dan

tarif dasar listrik, inflasi yang disebabkan faktor alam (seperti gagal panen), faktor-faktor sosial ekonomi (seperti masalah atau hambatan dalam distribusi suatu barang), atau faktor-faktor yang timbul karena kebijakan tertentu (seperti pajak, pembatasan impor maupun kebijakan lainnya).

c. Ekspektasi inflasi

Ekspektasi inflasi dipengaruhi persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan yang dapat berdampak pada keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja. Terdapat 2 jenis ekspektasi inflasi yaitu ekspektasi inflasi adaptif (yang didasarkan pada data historis) serta ekspektasi inflasi *forward-looking* (yang didasarkan pada analisis dan perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan).

Perubahan inflasi antar periode diukur dengan menggunakan indeks yang memperhitungkan jumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Perubahan indeks dari satu periode ke periode lainnya dinyatakan dalam persentase yang menggambarkan tingkat inflasi pada periode tersebut. Pola kenaikan harga suatu barang dan jasa tertentu secara umum dalam suatu periode waktu tertentu disebut dengan tingkat inflasi. Menurut Utari et al. (2007), tingkat inflasi meliputi inflasi ringan (kenaikan harga kurang dari 10 persen); inflasi menengah (kenaikan harga dari 10 persen hingga 30 persen); inflasi tinggi (kenaikan harga dari 30 persen hingga 100 persen); dan hiperinflasi (kenaikan harga melebihi 100 persen per tahun). Indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di mana IHK dikelompokkan menjadi sebelas kelompok pengeluaran antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan.

3. Penelitian Terdahulu

a. Dampak Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan

Penelitian Rahman, et al. (2023) menunjukkan bahwa harga gabah berpengaruh terhadap kesejahteraan petani padi di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga gabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Desa Buttu Sawe, karena petani padi sawah di Desa Buttu Sawe memiliki harga gabah yang baik. Sehingga berdampak pula terhadap kesejahteraan petani padi di Desa Buttu Sawe. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2021) dengan judul "Pengaruh Biaya Operasional dan Harga Jual Gabah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Laba Kecamatan Masamba". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel harga gabah mempunyai nilai t hitung $>$ t tabel ($2,385 > 1,655$) dan taraf signifikansi $<0,05$ ($0,018 < 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa harga jual gabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kehidupan petani di Desa Laba Kecamatan Masamba.

b. Dampak Harga Gabah Terhadap Harga Beras

Dalam penelitian yang dilakukan Hermanto (2017) menyatakan bahwa harga beras medium dan beras premium sejalan dengan perkembangan harga musiman gabah di mana pasokan dan kualitas gabah berubah-ubah saat musim panen puncak, musim

gadu maupun musim kemarau. Anggita (2021) juga menemukan hasil yang serupa yaitu harga gabah kering panen dapat mempengaruhi harga jual beras di mana jika terjadi kenaikan harga gabah kering panen sebesar seribu rupiah maka harga beras akan meningkat sebesar 0,979 ribu rupiah.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara (2022) menyatakan bahwa harga gabah kering panen tidak berpengaruh terhadap harga beras dan terdapat pengaruh harga gabah kering giling terhadap harga beras. Secara simultan, harga gabah kering panen dan gabah kering giling berpengaruh terhadap harga beras.

c. Dampak Harga Beras Terhadap Inflasi

Kusmutiarani et al. (2018) melakukan penelitian mengenai dampak fluktuasi harga tiga komoditas volatile food terhadap inflasi di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan model *vector autoregression* (VAR). Dari hasil penelitian terlihat bahwa dalam jangka pendek terdapat dua komoditas yang berpengaruh positif terhadap inflasi di Kota Pangkalpinang di mana salah satunya yaitu beras. Komoditas beras juga memiliki pengaruh positif terhadap inflasi di Kota Pangkalpinang dalam jangka panjang. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Azwina dan Syahbudi (2023) mengenai pengaruh fluktuasi harga komoditas pangan terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Utara ditemukan bahwa terdapat tujuh faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu beras. Serupa dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian oleh Rahmanta et al. (2020) disebutkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, harga beras berpengaruh positif terhadap inflasi.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Siregar (2020) dengan menggunakan metode *Partial Adjustment Model* (PAM) menemukan bahwa harga beras berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek dan panjang. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pradana (2019) dengan metode *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* yang menyatakan bahwa harga beras tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada penelitian-penelitian terkait implikasi harga gabah terhadap kesejahteraan petani dan inflasi belum terdokumentasi dengan baik. Selain menganalisis implikasi harga gabah terhadap kesejahteraan petani, penelitian ini juga akan menganalisis implikasi harga gabah terhadap inflasi melalui variabel perantara harga beras.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi. Persamaan model regresi dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang persamaannya dinotasikan sebagai berikut (Gujarati, 2019):

$$Y = \beta_1 X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} \dots X_n^{\beta_i} e^{\mu_n} \dots \dots \dots (1)$$

Kemudian model regresi tersebut menggunakan pendekatan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang persamaannya dinotasikan sebagai berikut (Gujarati, 2019):

$$Y = \beta_1 X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} \dots X_n^{\beta_i} e^{\mu_n} \dots \dots \dots (2)$$

Kemudian persamaan di atas ditransformasi menggunakan logaritma natural, sehingga

persamaan menjadi:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_2 \text{Ln}X_1 + \beta_3 \text{Ln}X_2 + \dots + \beta_i \text{Ln}X_n + \mu_n \quad ; \beta_0 = \text{Ln}\beta_1 \dots \dots \dots (3)$$

Dengan :

- Y adalah variabel dependen
- (X_1, X_2, \dots, X_n) adalah variabel independen
- ($\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$) adalah elastisitas *output* variabel independen terhadap variabel dependen

Dalam penelitian menggunakan tiga jenis model persamaan regresi yaitu:

$$\text{Ln}Y_1 = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 \dots \dots \dots (4)$$

$$\text{Ln}Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{Ln}Y_3 = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 \dots \dots \dots (6)$$

Dengan Y_1 adalah NTP, Y_2 adalah harga beras, Y_3 adalah inflasi, X_1 adalah GKP, X_2 adalah GKG, X_3 adalah harga beras. Adapun sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

- a. Hubungan harga gabah kering panen (GKP) dan harga gabah kering giling (GKG) terhadap kesejahteraan petani tanaman pangan.

Analisis hubungan GKP dan GKG terhadap kesejahteraan petani menggunakan model regresi dengan persamaan yaitu:

$$\text{Ln}(\text{NTP}) = 0,67 \text{Ln}(\text{GKP}) - 0,11 \text{Ln}(\text{GKG}) + 1,83 \quad ; R^2 = 0,7042 \dots \dots \dots (7)$$

(0,0041) (0,6728) (0,0052)

Dengan :

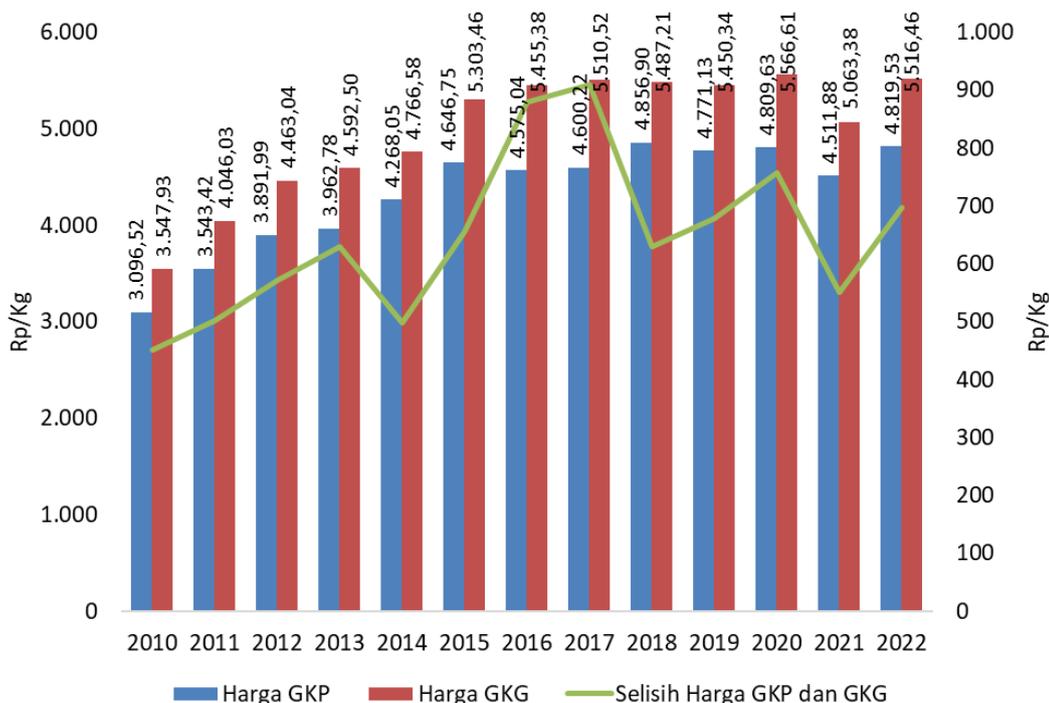
- NTP adalah nilai tukar petani tanaman pangan
- GKP adalah harga Gabah Kering Panen tahunan
- GKG adalah harga Gabah Kering Giling tahunan

Persamaan 1 di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Harga gabah kering panen (GKP) berimplikasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani. Setiap peningkatan 1 persen harga GKP berimplikasi meningkatkan kesejahteraan petani sebesar 0,67 persen.
 - 2) Harga gabah kering giling (GKG) tidak berimplikasi secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani.
 - 3) Koefisien determinasi sebesar 0,7042 persen menunjukkan bahwa harga gabah mampu memengaruhi tingkat kesejahteraan petani sebesar 70,42 persen. Sedangkan sisanya sebesar 29,58 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya.
- b. Analisis implikasi harga gabah kering panen dan harga gabah kering giling terhadap harga beras.

Analisis hubungan GKP dan GKG terhadap kesejahteraan petani menggunakan model regresi dengan persamaan yaitu:

lebih banyak menjual hasil produksinya dalam bentuk GKP. Padahal, nilai ekonomi GKP ini lebih rendah dibandingkan GKG seperti harga GKP tahun 2022 hanya sebesar Rp4.819,53 per kg, sedangkan GKG telah mencapai Rp5.516,46 per kg. Selisih perbedaan harga per kg mencapai Rp696,93. Meskipun harga GKP meningkat selama periode 2010 sampai 2022, namun perbedaan harga antara GKP dengan GKG semakin jauh (Gambar 3). Selain itu, rata-rata pertumbuhan harga GKP juga lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan harga GKG.

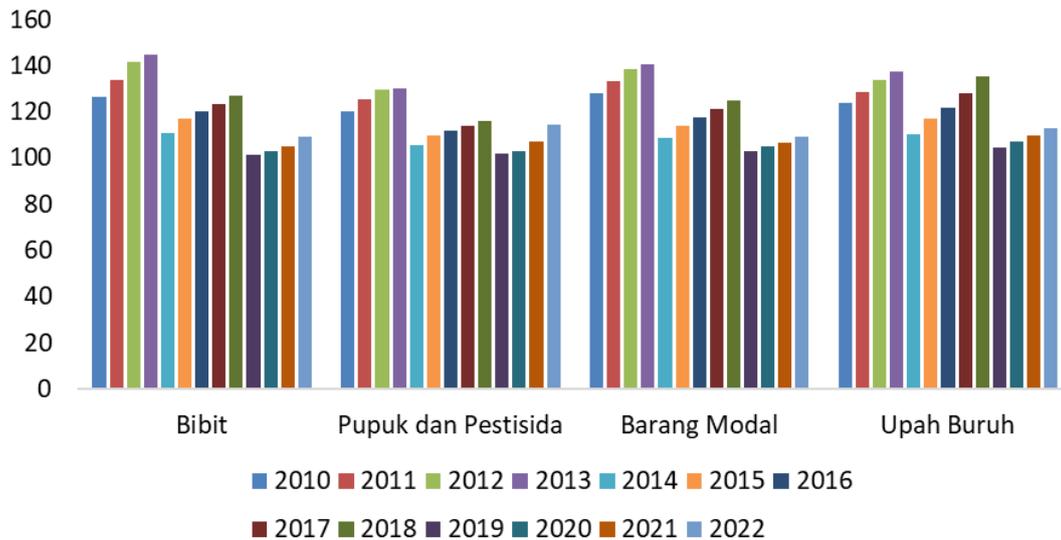


Gambar 3. Perbandingan Harga GKP dan Harga GKG

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023b (diolah).

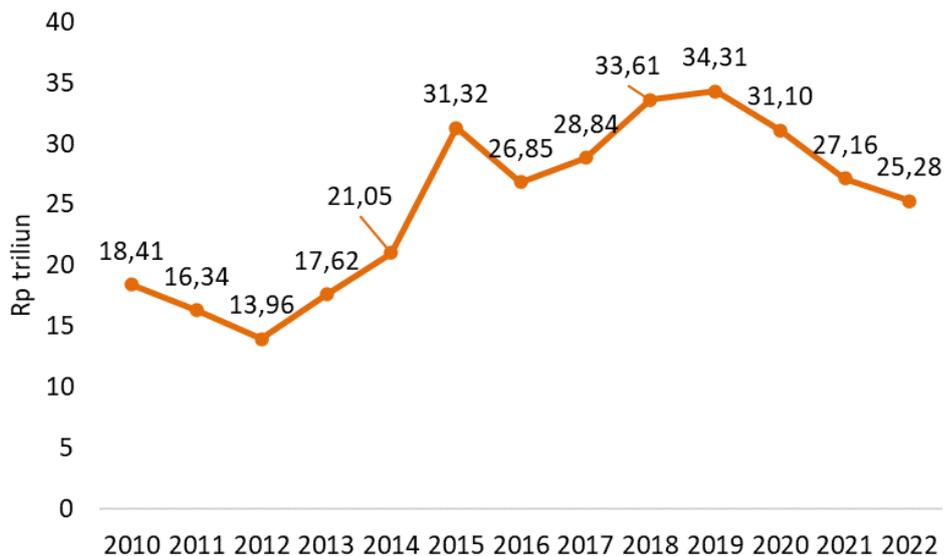
Walaupun harga GKG jauh lebih tinggi dibanding GKP, tetapi petani lebih memilih menjual hasil panennya dalam bentuk GKP. Hasil penelitian Setiawan (2019) menjelaskan perilaku petani tersebut, yaitu motivasi petani untuk segera memiliki uang, mahal biaya transportasi dan mahal biaya penjemuran. Sedangkan hasil penelitian Fitriani et al. (2021) menunjukkan tidak sebandingnya jumlah penggilingan padi dengan produksi gabah. Motivasi lain yang mendorong petani menjual padi dalam bentuk GKP yaitu karena desakan kebutuhan biaya untuk mengolah lahan, melunasi hutang input supaya dapat meminjam kembali, dan terikat waktu irigasi (Nugrahapsari dan Manuntun, 2021).

Meskipun harga GKP berimplikasi secara positif dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani, namun kenaikan harga tersebut selalu tergerus dengan meningkatnya biaya input produksi gabah yang tercermin dari indeks harga yang dibayar petani pada komponen indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Pada Gambar 3 terlihat bahwa meskipun pada beberapa komponen indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2010, namun nilainya mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sehingga berpotensi menggerus pendapatan petani (Gambar 3).



Gambar 4. Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023a (diolah).

Komponen pupuk menjadi salah satu yang mengalami peningkatan pada indeks yang harus dibayar petani selama tahun 2019 sampai 2022. Berdasarkan perkembangan belanja subsidi pupuk (Gambar 4), diketahui bahwa subsidi pupuk tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, namun nilainya menurun sejak tahun 2019 sampai 2022. Peningkatan nilai subsidi pupuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 37,29 persen. Di sisi lain, indeks harga yang harus dibayar petani pada komponen pupuk tahun 2022 menurun sebesar 4,69 persen dibandingkan tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan subsidi pupuk belum terlalu berdampak pada penurunan komponen biaya pupuk sehingga berpotensi menggerus penghasilan yang diterima petani meskipun harga GKP naik (Gambar 3).

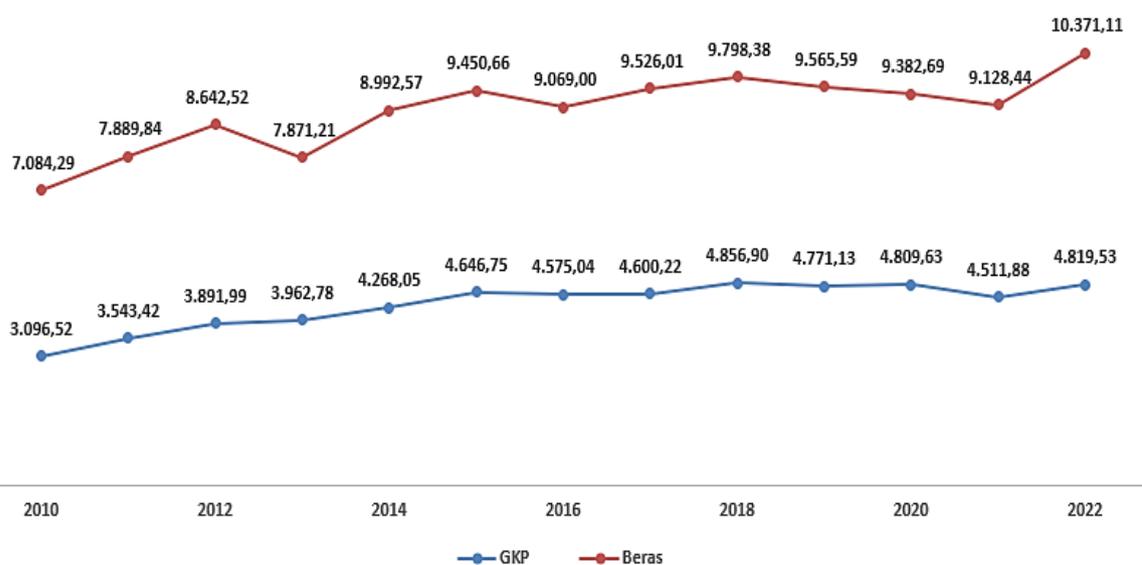


Gambar 5. Perkembangan Subsidi Pupuk
 Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2011-2023 (diolah)

b. Implikasi Harga GKP dan Harga GKG Terhadap Harga Beras

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) berimplikasi secara langsung terhadap harga beras. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2021) dan Lestari et al. (2022) yang menyebutkan bahwa harga GKP dapat mempengaruhi besar kecilnya harga jual beras. Badan Ketahanan Pangan dalam Hermanto (2017) menyebutkan bahwa perkembangan harga GKP pada musim panen raya (bulan Februari sampai Mei) cenderung menurun dan relatif lebih rendah jika dibandingkan periode lainnya yang disebabkan karena pasokan yang meningkat dan menurunnya kualitas gabah. Sedangkan saat musim gadu, harga GKP cenderung tinggi karena kualitas gabah yang lebih baik. Fluktuasi harga GKP tersebut berdampak pada harga bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan beras. Biaya produksi beras menjadi naik saat harga GKP tinggi sehingga berdampak pada kenaikan harga beras. Hal yang sama juga disebutkan Nugrahapsari dan Manuntun (2021) dalam penelitiannya bahwa harga beras sering kali naik saat masa panen gadu berangsur turun setelah masuk panen raya.

Beras berkualitas tinggi akan meningkatkan daya saing dan nilai pasar beras sendiri. Aspek teknologi pengolahan beras memegang peranan penting. Untuk menggiling beras, kapasitas penggilingan yang dibutuhkan tergantung dari banyaknya beras yang akan digiling dalam waktu tertentu. Tujuannya agar penggilingan dapat bekerja maksimal dan menekan biaya penggilingan per kilogram beras. Pemutakhiran Data Perusahaan Industri Penggilingan Padi 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021) mengelompokkan usaha penggilingan padi ke dalam tiga skala usaha yaitu industri penggilingan padi besar dengan kapasitas produksi beras >3 ton/jam; industri penggilingan padi menengah dengan kapasitas produksi beras antara 1,5 - 3 ton/jam; dan industri penggilingan padi kecil dengan kapasitas produksi beras <1,5 ton/jam. Laporan Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 95 persen usaha penggilingan padi di Indonesia didominasi oleh penggilingan padi skala kecil dan hanya 4,3 persen merupakan usaha penggilingan padi skala menengah yang umumnya memiliki mesin dengan kapasitas besar, terintegrasi dan modern.



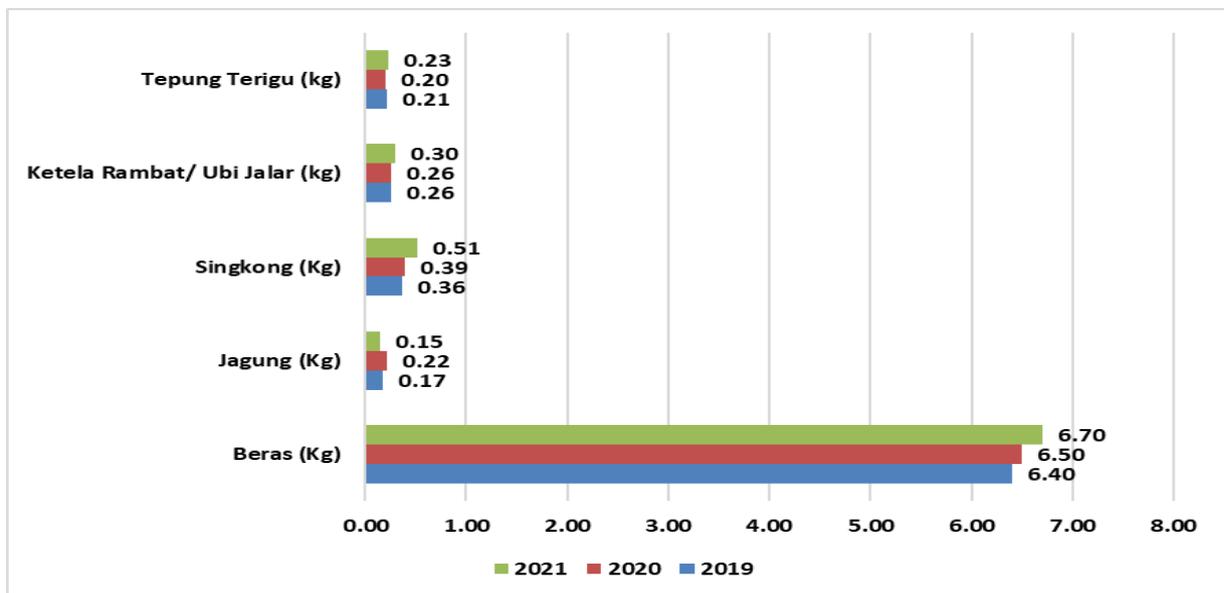
Gambar 6. Perbandingan Harga GKP (Rupiah) dengan Harga Beras (Rupiah) 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023b, 2023c (diolah).

Dengan teknologi yang modern, tidak heran jika modal untuk membeli mesin ini sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan teknologi penggilingan padi masih didominasi oleh perusahaan padat modal (Aulia, 2021). Optimalnya, penggilingan beras semakin banyak pada kelompok tani. Sehingga perusahaan penggilingan beras besar dan kelompok tani dapat berbentuk seperti *factory sharing*. Harapannya dengan adanya *factory sharing* maka kesejahteraan petani juga dapat lebih meningkat dan produksi dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding GKP.

c. Implikasi Harga Beras Terhadap Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras mampu memengaruhi tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan konsumsi karbohidrat masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh komoditas beras. Per tahun 2021 konsumsi komoditas beras masih sangat mendominasi sebesar 6,70 kg per kapita per bulan (Gambar 7).



Gambar 7. Perbandingan Konsumsi Karbohidrat

Sumber: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2021

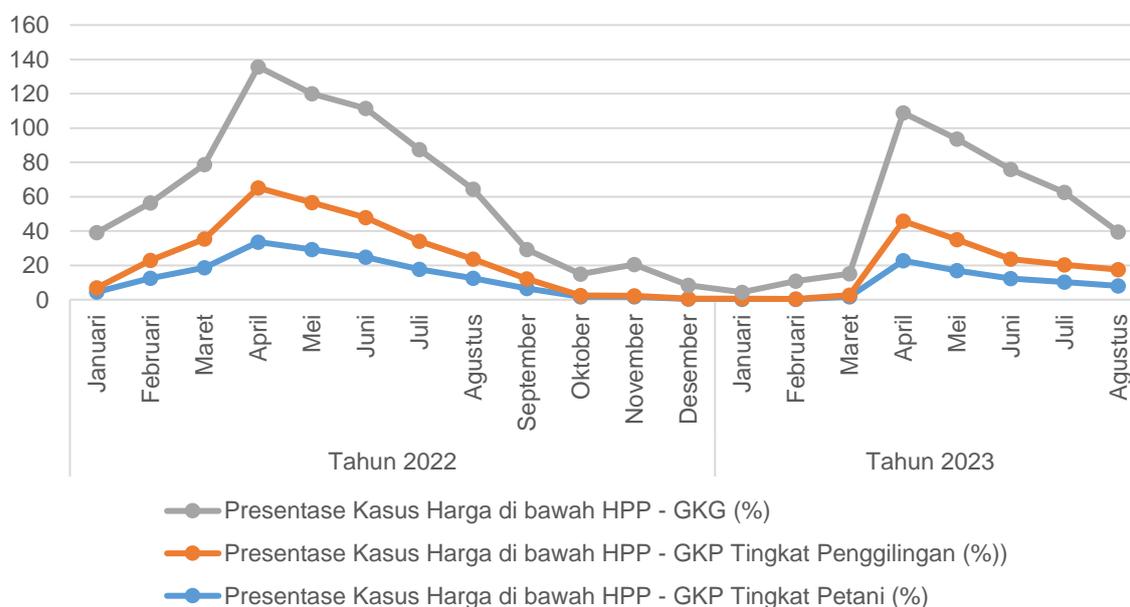
Kemudian menurut Kementerian Pertanian (2022), sekitar 94 persen penduduk Indonesia mengonsumsi karbohidrat dari beras pada tahun 2021. Hal ini relatif tersebar merata di seluruh Indonesia, yang berarti bahwa secara ekonomi, nutrisi, sosial dan budaya, beras masih merupakan makanan terpenting bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, dalam komposisi pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, beras mempunyai proporsi tertinggi. Oleh karena itu, inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga beras.

Harga beras dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran barang. Tingginya permintaan beras sedangkan pasokan beras cenderung stagnan akan menyebabkan harga beras di pasaran semakin tinggi. Kenaikan harga beras yang tajam akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, dalam pengendalian laju inflasi di Indonesia, salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah pengendalian harga kelompok bahan pangan, khususnya beras. Peran kelompok pangan terhadap inflasi diperkirakan masih dominan, setidaknya hingga 5-10 tahun ke depan (Putra, 2017).

Adanya periodisasi dalam penanaman padi menunjukkan tidak meratanya jumlah panen beras sepanjang tahun sehingga menyebabkan kenaikan harga beras pada musim gadu.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa harga beras berimplikasi terhadap inflasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmutiarani et al. (2018), Rahmanta et al. (2020) dan Chintia dan Rian (2022) yang menyebutkan bahwa harga beras berdampak positif terhadap inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga stok dan kestabilan harga beras melalui manajemen penyimpanan dan distribusi beras yang baik.

Selain itu, diperlukan pengaturan distribusi penanaman supaya lebih menyebar secara rata sehingga panen bisa lebih merata tidak hanya tinggi di musim tertentu saja. Bukan hanya pada distribusi penanaman semata, tetapi pemerintah harus menggerakkan petani sebagai produsen beras. Hal ini merupakan upaya juga dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila petani menjual dalam bentuk komoditi gabah kering panen, maka petani cenderung merugi apalagi pada saat panen raya. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi gabah kering panen memiliki ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan itu sering terjadi menjelang panen raya periode Februari-Mei, padahal panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Penantian tersebut sering kali petani menelan kekecewaan, karena menjelang dan sampai panen raya harga gabah sering anjlok, bahkan meningkatnya kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) (Gambar 8).



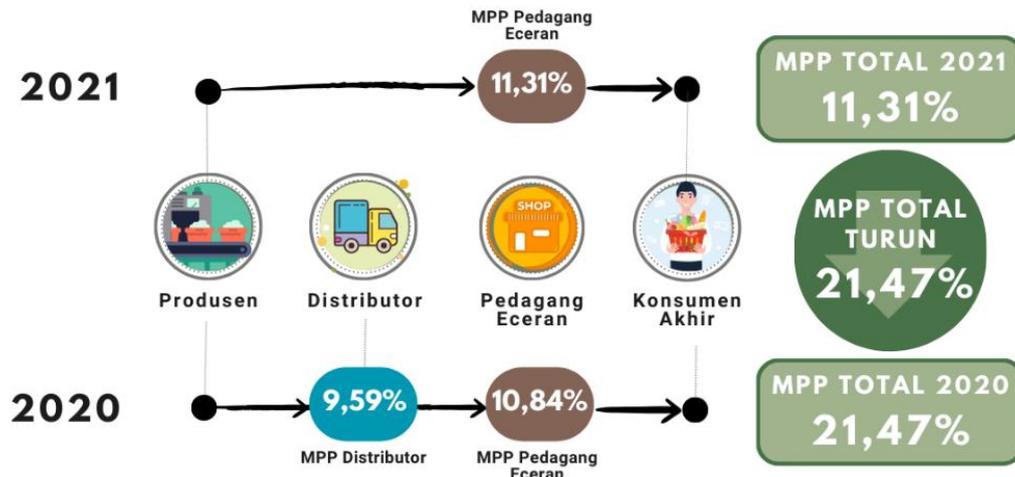
Gambar 8. Kasus Pembelian Harga Gabah di Bawah HPP

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan Gambar 8 di atas diperoleh informasi yaitu anjloknya harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya menunjukkan bahwa kebijakan yang diatur pemerintah ternyata belum bisa membuat petani memperoleh keuntungan akibat harga gabah selalu anjlok ketika masa panen raya.

Selain itu, harga sangat bergantung pada harga pasar, maka keuntungan akan lebih dinikmati oleh pedagang dari pada petani yang terlihat dari Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP). Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (2015) keuntungan yang diperoleh petani dari penjualan gabah jauh lebih kecil jika dibandingkan harga jual di pedagang (Putra, 2015). Jika harga gabah Rp3.500, diproses dengan rendemen 62 atau 65 maka harga beras Rp5.000 per kilogram. Harga di tingkat pedagang atau kota Rp 10.000. Artinya ada keuntungan Rp 5.000 di pengusaha. Meskipun per tahun 2021 pola distribusi

perdagangan beras sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020, tetapi petani belum sepenuhnya menjadi produsen beras di mana MPP total tahun 2021 menurun sebesar 10,16 persen dibandingkan MPP total tahun 2020 (Gambar 9).



Gambar 9. Perbandingan Pola Utama Perdagangan Beras

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022b

Sementara itu, pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan gabah dan beras melalui kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga dan melindungi tingkat kesejahteraan petani, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum, yang selanjutnya konsep harga dasar disesuaikan menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Esensi dari penerapan HPP tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi petani dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (market clearing price), terutama pada saat panen raya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, terdapat beberapa yang diperoleh yaitu:

1. Harga gabah kering panen berimplikasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani sedangkan harga gabah kering giling tidak berimplikasi secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani. Petani lebih banyak menjual hasil produksinya dalam bentuk gabah kering panen meskipun nilai ekonominya lebih rendah dibandingkan gabah kering giling. Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa hal terkait ekonomi seperti kebutuhan untuk mendapatkan uang cepat, biaya transportasi dan biaya penjemuran yang mahal, keterbatasan alat penggilingan, dan penanaman yang terikat waktu irigasi. Di sisi lain, dampak positif harga gabah kering panen terhadap kesejahteraan petani tergerus dengan meningkatnya biaya input produksi gabah.
2. Harga gabah kering panen berimplikasi positif dan signifikan terhadap harga beras, namun harga gabah kering giling tidak berimplikasi secara signifikan terhadap harga beras. Harga gabah kering panen mengalami fluktuasi yaitu cenderung menurun pada musim panen raya yang disebabkan peningkatan pasokan dan penurunan kualitas gabah, dan cenderung tinggi saat musim gadu karena kualitas gabah yang lebih baik (Hermanto, 2017). Fluktuasi harga gabah kering panen tersebut berdampak pada meningkatnya harga bahan baku beras pada saat harga gabah kering panen tinggi sehingga berdampak pada kenaikan harga beras.

3. Harga beras berimplikasi positif signifikan terhadap inflasi. Namun, harga gabah kering panen dan harga gabah kering giling tidak berimplikasi secara langsung terhadap inflasi tetapi berimplikasi secara langsung terhadap harga beras. Fluktuasi harga gabah dari musim panen raya hingga musim gadu berdampak pada harga bahan baku untuk menghasilkan beras. Periodisasi dalam penanaman padi menunjukkan ketidakmerataan jumlah panen beras sepanjang tahun yang berpengaruh pada kenaikan harga beras khususnya saat musim gadu. Kenaikan harga beras saat musim gadu berimplikasi terhadap inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga stok dan kestabilan harga beras melalui manajemen penyimpanan dan distribusi beras yang baik. Selain itu, diperlukan pengaturan distribusi penanaman supaya lebih menyebar secara rata sehingga panen bisa lebih merata tidak hanya tinggi di musim tertentu saja.

Melihat beberapa poin simpulan sebelumnya, maka diperlukan upaya pengendalian harga gabah kering panen melalui pengendalian biaya input gabah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, pengaturan produksi gabah kering panen juga perlu dilakukan khususnya saat musim gadu karena berdampak pada kenaikan harga beras yang akhirnya mempengaruhi inflasi.

Untuk mengendalikan inflasi karena dampak harga beras, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Manajemen penyimpanan dan distribusi beras yang baik perlu terus dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menjaga stok dan kestabilan harga beras.
2. Pengaturan dalam distribusi penanaman sehingga jumlah hasil panen bisa tersebar secara lebih merata.
3. Pemerintah meningkatkan peran petani menjadi produsen beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, T.T. (2014). Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Astuti, U.P., Wahyu, W. dan Andi, I. (2011). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pangan Menjadi Kelapa Sawit di Bengkulu: Kasus Petani di Desa Kungkai Baru. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian..
- Anggita, V. (2021). Pengaruh Produksi Padi, Harga Gabah Kering Panen dan Konsumsi Beras Terhadap Harga Beras di Indonesia Tahun 2013-2019 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia). Universitas Islam Indonesia.
- Aulia, H. (2021). Prospek Usaha Penggilingan Padi Indramayu CV Fajar Jaya Nusantara. Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azwina, R., dan Syahbudi, M. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun (2019-2021). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 238-249.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011-2023). Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010-2022. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bapepenas.

- Badan Pusat Statistik. (2021). Ringkasan Eksekutif Pemutakhiran Data Usaha/Perusahaan Industri Penggilingan Padi 2020. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/09/f456234e20b65fb9f055c79a/ringkasan-eksekutif-pemutakhiran-data-usaha-perusahaan-industri-penggilingan-padi-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022a). Statistik Nilai Tukar Petani 2022. Diperoleh tanggal 23 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/publication/2023/04/10/976011cd754095dec0ba5ef8/statistik-nilai-tukar-petani-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2022. Diperoleh tanggal 23 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/publication/2022/10/24/2a4fb384020c45bbaeb535a6/distribusi-perdagangan-komoditas-beras-di-indonesia-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan); NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura); NTPR (Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan); NTPT (Nilai Tukar Petani Peternakan) Menurut Sektor (2018=100) 2019-2024. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/site/resultTab>.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Rata-rata Harga Gabah Menurut Kelompok Kualitas dan HPP di Tingkat Petani dan Tingkat Penggilingan (Rupiah/kg), 2000-2022. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/10/20/1596/rata-rata-harga-gabah-menurut-kelompok-kualitas-dan-hpp-di-tingkat-petani-dan-tingkat-penggilingan-rupiah-kg-2000-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023c). Rata-rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas (Rupiah/Kg) 2010-2022. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/36/500/2/rata-rata-harga-beras-bulanan-di-tingkat-penggilingan-menurut-kualitas.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023d). Kasus Harga Gabah di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulanan 2022-2023. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/site/resultTab>.
- Badan Pusat Statistik. (2023e). Inflasi 90 Kota (Umum) 2010-2020. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/3/1708/4/inflasi-90-kota-umum-.html>. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). (2023). Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat: Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- Chintia, R.A. dan Rian, D. (2022). Pengaruh Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(2), 244-258.
- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). (2023). Policy Paper No. 54: Policy Barriers to a Healthier Diet, The Case of Trade and Agriculture. Diperoleh tanggal 25 Agustus 2023, dari https://www.cips-indonesia.org/files/ugd/c95e5d_2616ae02694273a15f3530d08cb4ba.pdf
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara. (2022). Pengaruh Harga GKP Dan GKG Terhadap Harga Beras Medium di Kabupaten Jepara Tahun 2022. Jawa Tengah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2023, dari <https://dkpp.jepara.go.id/2022/12/26/pengaruh-harga-gkp-dan-gkg-terhadap-252>

harga-beras-medium-di-kabupaten-jepara-tahun-2022-menggunakan-metode-regresi-linear/.

- Faillah. (2022). Dampak Harga Gabah Terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan: Aplikasi Autoregressive Distribusi Lag (ARDL). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 6(3), 1162-1171 .
- Fitriani, Cholid, F., Sutarni, dan Fembriarti, E.P. (2021). Keberlanjutan Rantai Nilai Komoditas Beras. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 6(1), 27-33.
- Gujarati. (2019). *Basic Econometrics, Sixth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Hermanto, S. (2017). Kebijakan Harga Beras Ditinjau Dari Dimensi Penentu Harga. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(1), 31-43.
- Ilman, S. A., dan Syahbudi, M. (2023). Pengaruh Harga Gabah terhadap Kesejahteraan Petani di Sumatera Utara pada Tahun 2020-2021. *EI-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 174-183.
- Kementerian Pertanian. (2021). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Kementerian Pertanian. (2022). *Statistik Pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kusmutiarani, A.W., Yudi, S.P., Fournita, A. (2018). Dampak Fluktuasi Harga Tiga Komoditas Volatile Food Terhadap Inflasi di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 2(5), 364-377.
- Lestari, L. (2021). *Pengaruh Biaya Operasional Dan Harga Jual Gabah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Desa Laba Kecamatan Masamba (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo)*.
- Lestari, I., Joan, M., dan Doni S. (2022). Analisis Determinan Harga Beras di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*. 11(1), 53-62.
- Nugrahapsari, R.A. dan Manuntun, P.H. (2021). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Harga Gabah Dan Beras di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 39(1), 11-26.
- Pradana, R.S. (2019). *Kajian Perubahan dan Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis Serta Pengaruhnya Terhadap Inflasi di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, 19(2), 85-100.
- Putra, Y. M. (2015, Juni 3). Keuntungan Petani Lebih Kecil Dibandingkan Pedagang. Diperoleh tanggal 31 Agustus 2023, dari <https://news.republika.co.id/berita/npd0ti/keuntungan-petani-lebih-kecil-dibandingkan-pedagang>.
- Putra, Y.P. (2017). Analisis Pengaruh Harga Beras, Produksi Beras dan Pdrb Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2010–2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Rachmat, Muchjidin. (2013). *Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran, dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian.
- Rahman, R., Andi, N. dan Andi, E.S. (2023). Analisis Dampak Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Agribis*, 11(1), 25-33.

- Rahmanta, Sri, F.A., Fadhilah, E.F., dan Sitorus, R.S. (2020). Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 13(2), 81-92.
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, B. (2019). *Motivasi Petani Menjual Gabah Kering Panen di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siregar, W.P. (2020). *Analisis Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi di Kota Sibolga*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suseno dan Astiyah. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Syekh, S. (2013). Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi di Provinsi Jambi. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(4), 253-260.
- Utari, G.A.D., Retni, C.S., dan Sudiro, P. (2015). *Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.